

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN KEPALA DESA DALAM MEMAJUKAN DESA BUNTU TURUNAN KECAMATAN HATONDUHAN KABUPATEN SIMALUNGUN**

**Christian Daniel Hermes<sup>1</sup>, Dwita Intan Sari Silalahi<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Dosen Prodi PPKn FKIP USI**

[chrisdhermes@gmail.com](mailto:chrisdhermes@gmail.com)

### **Abstrak**

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat baik dalam proses mengidentifikasi permasalahan, kontribusi sukarela masyarakat kepada sebuah proyek tanpa ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. proses aktif yang terbuka dimana tiap orang atau kelompok yang terkait agar mengambil inisiatif serta mendayagunakan kebebasannya untuk ikut terlibat

Bertujuan untuk mengetahui apa yang melatar belakangi tentang partisipasi masyarakat dengan dukungan kepala desa dalam memajukan desa buntu turunan kecamatan hatonduhan kabupaten Simalungun dan untuk mengidentifikasi faktor - faktor yang menjadi penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam memajukan desa buntu turunan kecamatan hatonduhan kabupaten Simalungun. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Buntu Turunan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif model Deskriptif.

Hasil penelitian Partisipasi warga dalam pelaksanaan pembangunan belum berjalan secara baik, terutama partisipasi secara fisik dalam hal pembangunan di desa, namun Kepala Desa telah berusaha untuk mengajak warga, namun masih ada warga yang belum menyadari dan mau terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dan faktor kurangnya partisipasi masyarakat dalam memajukan desa yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, lebih mementingkan berladang, bersawah dan menangkap gaji.

**Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Kepala Desa**

### **A. Pendahuluan**

Sejalan dengan tujuan otonomi daerah berdasarkan regulasi yang ada, desa sebagai ujung tombak Pemerintah, sehingga Pemerintah memberikan kewenangan besar untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Kebijakan Pemerintah untuk memberikan dana desa, menyebabkan perlu adanya partisipasi masyarakat disegala bidang pemanfaatan dana desa. Tugas dan peran masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat dari dana desa, akan tetapi masyarakat harus ikut terlibat dalam perencanaan, sampai dengan evaluasi pemanfaatan dana desa tersebut.

Partisipasi adalah kerja sama antara masyarakat serta Pemerintah untuk merancang, melakukan, melestarikan serta meningkatkan hasil pembangunan. Keterlibatan warga sebagai bagian dari penentu keberhasilan kegiatan pembangunan di desa. Setiap program baik dalam

tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan serta mengevaluasi kegiatan pembangunan tersebut, harus melibatkan seluruh masyarakat. Kebutuhan yang tidak lain adalah untuk kegiatan pembangunan dan yang harus diberdayakan yang ada di tengah - tengah masyarakat.

Partisipasi masyarakat Desa Buntu Turunan merupakan suatu alat memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat Desa Buntu Turunan yang tanpa kehadirannya dalam pembangunan akan gagal. Kepala Desa sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Buntu Turunan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan aparat Pemerintah Desa Buntu Turunan bisa lebih benar-benar bekerja dengan baik demi memajukan Desa Buntu Turunan.

Diketahui bahwa Pemerintah Desa Buntu Turunan selalu memberikan informasi kepada masyarakat, baik melalui rapat atau *online* melalui *via* grup whatsapp. Kepala Dusun sebagai perpanjangan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, dan Kepala Desa juga memberikan suatu motivasi kepada masyarakat agar ikut serta dalam memajukan Desa Buntu Turunan.

Kepala Desa Buntu Turunan telah berupaya untuk memberikan arahan kepada masyarakat dalam memajukan Desa Buntu Turunan, namun masyarakat Desa Buntu Turunan terlihat mengabaikan arahan tersebut, seperti disaat Kepala Desa memberikan arahan untuk melaksanakan gotong royong bersama masyarakat Desa Buntu Turunan hanya sedikit yang ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan gotong royong tersebut.

Adapun masalah – masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dan dukungan kepala desa dalam memajukan desa buntu turunan?
2. Bagaimanakah faktor penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam memajukan desa buntu turunan?

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **a. Pengertian Kepala Desa**

Dalam struktur Pemerintahan di Indonesia, desa merupakan bentuk wilayah pemerintahan yang terendah. Berdasarkan kajian sejarah, desa adalah daerah otonom yang paling tua, didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya negara - negara (kerajaan), oleh karena itu mempunyai hak otonom penuh. Pengertian Desa sesuai Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, ditegaskan sebagaimana Kepala Desa adalah pemimpin desa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Kepala Desa sebagai pimpinan desa.

Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu - pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara Kepala Desa beserta mendayagunakan organisasi - organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dalam mengemban tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ada di Desa, disamping itu Kepala Desa diharapkan mampu memberikan dan pengarahan bagi masyarakat desanya.

#### b. Partisipasi Masyarakat

Menurut Ardiansyah (Andi, 2010), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat baik dalam proses mengidentifikasi permasalahan, maupun potensi yang ada di sekitar masyarakat. Meliputi proses memilih dan mengambil sebuah keputusan, baik alternatif solusi untuk menangani masalah, maupun proses pelaksanaan mengatasi masalah, serta keterlibatan dalam hal mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi akan memberikan manfaat yang penting bagi keberhasilan organisasi yaitu, lebih memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar karena banyaknya sumbangan yang berarti dan positif, mengedepankan komunikasi dua arah sehingga baik bawahan maupun atasan memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan pemikiran dan mendorong kemampuan berpikir kreatif demi kepentingan bersama.

### C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam pembahasan ini, yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Peneliti melakukan research studi dengan cara studi pustaka yaitu Pada penelitian ini digunakan dengan cara membaca buku - buku untuk membahas masalah penulisan sesuai dengan teori dan lapangan.

---

#### **D. Pembahasan**

Setelah dilihat dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa antara hasil penelitian dengan rumusan masalah yang sudah dilaksanakan. Berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan dari Kantor Kepala Desa Buntu Turunan, perangkat desa dan masyarakat yang sudah dipilih sebagai informan mengatakan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang.

Langkah yang digunakan dalam penelitian agar partisipasi masyarakat lebih bagus lagi yaitu melaksanakan bersama - sama untuk melakukan gotong royong demi memajukan Desa Buntu Turunan dan memberi dorongan dan pengadaran kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memajukan desa.

Masyarakat Desa Buntu Turunan merupakan desa yang dimana masyarakat masih lebih mengutamakan berladang, menangkap gaji dari pada melakukan kegiatan untuk memajukan desa.

#### **1. Partisipasi Masyarakat Dan Dukungan Kepala Desa Dalam Memajukan Desa Buntu Turunan**

Hasil penelitian penulis berdasarkan wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dari delapan dusun tersebut pada dasarnya sudah memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang baik, hal ini dikarenakan masyarakat selalu ikut serta dalam pembangunan desa. Namun hanya ada satu Dusun yang memiliki kurangnya partisipasi masyarakat hal ini karena kurangnya kesadaran masyarakat di dusun tersebut. Dan menurut informan Kaur Pemerintahan di satu dusun ini dominan masyarakatnya berladang, bersawah, maupun menangkap gaji, tapi itu pun tergantung bagaimana cara penyampaian kita kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi.

Upaya yang dilakukan Kepala Desa untuk dusun yang belum aktif dalam berpartisipasi informan mengatakan akan memberikan motivasi serta arahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik, memperluas pemahaman dan kesadaran masyarakat. Dan menurut hasil wawancara penulis terhadap Kaur Pemerintahan beliau mengatakan bahwa kepada masyarakat itu kita harus lembut, ramah tamah, sopan itu yang penting, karena jika kita keras otomatis masyarakatpun akan menolak untuk ikut berpartisipasi, jadi di dusun yang memiliki kurangnya partisipasi masyarakat itu kita harus lebih ramah lagi. Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas bahwa Kepala desa berusaha untuk mengajak masyarakat, namun masih ada masyarakat yang merasa kegiatan yang dibuat oleh kepala desa tidak penting sehingga apa yang telah disepakati banyak masyarakat tidak mengetahuinya.

## **2. Faktor Penyebab Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Memajukan Desa Buntu Turunan**

Adapun faktor penghambat yang berasal dari individu yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah sumber daya manusia dan tingkat kesadaran masyarakat serta masalah yang berasal dari luar diri masyarakat. Masyarakat seharusnya ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan - kegiatan pembangunan untuk mempermudah jalannya kegiatan yang dilaksanakan agar hasil yang dicapai secara efektif. Hal ini sesuai dengan teori (Slamet, 1993), Kesadaran masyarakat yang rendah merupakan salah satu hambatan pelaksanaan pembangunan. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dan faktor pendukung yang paling menentukan adalah peran Kepala Desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu didukung dengan adanya potensi sumber daya alam yang siap dikelola, keadaan wilayah cukup luas serta tersedianya anggaran untuk pembangunan yang dialokasikan melalui Anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan Pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan di Desa Buntu Turunan. Kebijakan bersama yang terlibat dalam kegiatan pembangunan merupakan faktor pendukung bagi Kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dan faktor pendukung lainnya Kepala Desa memberikan motivasi kepada masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam memajukan desa. Motivasi secara sosial yang dilakukan oleh kepala desa berupa pemberian arahan binaan ataupun penyuluhan kepada para wakil masyarakat maupun seluruh masyarakat desa Buntu Turunan tentang informasi dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa Buntu Turunan dan memberikan pengertian akan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan yang diperlukan melalui sebuah rapat atau musyawarah desa yang disebut juga dengan rembug desa yang dilakukan minimal dua kali dalam setahun.

Oleh karena itu apabila kepala desa mampu mengkomunikasikan setiap program pembangunan dan mampu melaksanakan koordinasi dengan baik maka kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat agar dapat selesai dengan cepat dan dapat berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kepala desa buntu turunan sebagai ujung tombak dari keberhasilan pembangunan di desanya.

### **E. Penutup**

1. Partisipasi warga dalam pelaksanaan pembangunan belum berjalan secara baik, terutama partisipasi secara fisik dalam hal pembangunan di desa, namun Kepala Desa telah berusaha

untuk mengajak warga, namun masih ada warga yang belum menyadari dan mau terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

2. Faktor kurangnya partisipasi masyarakat dalam memajukan desa yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, lebih mementingkan berladang, bersawah dan menangkap gaji.

### Daftar Pustaka

- Andi, Ardiansyah, (2010). Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Politik perempuan Di Desa alenangka kecamatan Sinjai Selatan. Kabupaen Sinjai, Makassar.
- Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2017). Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. *ARISTO*, 5(1), 126 -140.
- Cahyanti, I. D., Cikusin, Y., & Sekarsari, R. W. (2019). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 13(5), 79 - 89.
- Haluana'a, F. J. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Orahili Kecamatan Pulau - Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kartika, R. S. (2012). Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(3), 179-188.
- Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di desa wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 38 - 44.
- Slamet. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentan Pemerintahan Daerah